

## **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kesempatan yang besar kepada nagari untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan peningkatan kualitas hidup masyarakat nagari. Dengan dibekali oleh anggaran yang besar, pemerintah nagari diharapkan mampu menerapkan pengelolaan keuangan yang baik.

Dengan mengambil sampel Nagari Pasilihan sebagai representasi nagari tertinggal dan Nagari Sulit Air yang merupakan nagari berkembang di Kecamatan X Koto Datas Kabupaten Solok, didapatkan gambaran tentang bagaimana postur keuangan nagari, bagaimana pengelolaan keuangan nagari dan kendala yang dihadapi serta bagaimana implikasi dari pengelolaan keuangan nagari. Berdasarkan hasil analisis didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Postur Keuangan Nagari Pasilihan dan Nagari Sulit Air didapatkan kondisi rata-rata sebagai berikut:
  - a. Sumber pendapatan nagari masih didominasi dari pendapatan transfer, yaitu dana yang dikucurkan dari pemerintah pusat (42,59) dan daerah (51,67%), sementara itu sumber pendapatan lainnya seperti Pendapatan Asli Nagari dan Pendapatan lain-lain tidak begitu signifikan.
  - b. Belanja nagari dialokasikan untuk belanja di bidang pembangunan (43,78%), bidang pemerintahan (35,50%), bidang pemberdayaan (6,67%), bidang pembinaan (13,22%) dan bidang tak terduga (0,82%).

Besarnya anggaran nagari menuntut pemerintah nagari mampu mewujudkan pengelolaan keuangan nagari yang baik berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Pengelolaan keuangan nagari meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelola keuangan nagari melaksanakan berbagai aktivitas dan prosedur dalam setiap tahapan serta melakukan pengadministrasian dalam setiap tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Dalam melaksanakan tahapan tahapan pengelolaan keuangan nagari, pemerintah nagari secara umum dihadapkan kepada persoalan-persoalan sebagai berikut:
  - a. Komunikasi dengan Badan Permusyawaratan Nagari tidak berjalan dengan baik. Hal ini terjadi pada tahap perencanaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan nagari.
  - b. Masih terjadi perbedaan persepsi teknik penyusunan anggaran antara tim penyusun anggaran nagari dan tim evaluasi anggaran kecamatan.
  - c. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan nagari masih belum dapat dilaksanakan secara tepat waktu pada setiap tahapannya. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterlambatan perolehan data dari pemerintah kabupaten pada tahap perencanaan serta faktor ketidak disiplin pihak-pihak yang terkait. Keterlambatan dalam sebuah proses menimbulkan akumulasi keterlambatan hingga tahap akhir.
  - d. Unit pengelola kegiatan yang berasal dari unsur masyarakat masih kurang terampil dalam melaksanakan penatausahaan pengelolaan kegiatan serta koordinasi dengan pemerintah nagari kurang berjalan dengan baik.
  - e. Pelaksanaan kegiatan di nagari masih diwarnai dengan konflik antara masyarakat dan aparatur pengelola kegiatan.
  - f. Aparatur pengelola kegiatan merasa tertekan dengan pengawasan informal dari masyarakat.
3. Implikasi yang ditimbulkan dari Pengelolaan Keuangan Nagari meliputi aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek infrastruktur sebagai berikut:
  - a. Aspek sosial memperlihatkan semakin meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Partisipasi masyarakat juga semakin meningkat serta semakin bergairahnya aktivitas kemasyarakatan pada berbagai bidang. Disisi lain juga memunculkan sikap kritis masyarakat dalam melakukan pengawasan pembangunan dan jalannya pemerintahan nagari.

- b. Aspek ekonomi memperlihatkan peningkatan produksi pertanian, meningkatnya jumlah uang yang beredar ditengah masyarakat serta tergarapnya lahan tidur / tidak produktif.
- c. Aspek infrastruktur berupa terwujudnya lingkungan pemukiman yang lebih sehat, kelancaran arus barang dan jasa, meningkatnya kenyamanan masyarakat serta kepuasan masyarakat atas terpenuhinya fasilitas infrastruktur penunjang dalam pelaksanaan aktivitas masyarakat.

## **B. Saran**

Mencermati kondisi pengelolaan keuangan di nagari Pasilihan (nagari tertinggal) dan Sulit Air (nagari berkembang), mengacu kepada permasalahan yang dihadapi oleh nagari dalam pengelolaan keuangan nagari, maka beberapa hal yang dapat disarankan adalah sebagai berikut:

- a. Perlu ditingkatkan kompetensi dan membangun komitmen pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan nagari yaitu aparatur pemerintah nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, termasuk Pengurus organisasi/lembaga nagari/kelompok masyarakat pengguna anggaran nagari. Peningkatan kompetensi dan komitmen dapat dilakukan melalui perluasan dan penajaman metode diklat dan bimbingan teknis, kondisi yang diharapkan adalah pengelolaan keuangan nagari lebih professional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dapat meminimalisir berbagai kendala yang muncul saat ini.
- b. Perlu meningkatkan kompetensi, komitmen dan etos kerja petugas pendampingan nagari dan petugas verifikasi tingkat kecamatan, diharapkan peran dan fungsi pihak-pihak tersebut dapat bersinergi dan berkolaborasi lebih baik dengan pemerintah nagari dan dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan nagari.
- c. Dalam rangka mengantisipasi berbagai keterlambatan dalam setiap tahap pengelolaan keuangan nagari, perlu disusun kalender kegiatan nagari, pelaksanaan agenda nagari sesuai kalender kegiatan nagari perlu menjadi perhatian dalam melakukan pengawasan baik secara internal maupun pengawasan dari Pemerintah Kecamatan/kabupaten.



- d. Mengingat banyaknya keluhan dan konflik antara Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, perlu dipertegas ruang lingkup kewenangan, tata laksana tugas dan kode etik pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Nagari.
- e. Perlu meningkatkan koordinasi antara pemerintah nagari dengan unit pengelola kegiatan nagari dari unsur masyarakat guna membenahi kelemahan dan kekurangan yang terjadi.
- f. Mengintensifkan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meredam potensi konflik dengan masyarakat serta mengaplikasikan konsep konsep transparansi dalam pengelolaan keuangan nagari.

